



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL  
**SUB UNIT KERJA** : BIRO UMUM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ADE SUDRAJAT
2. Jabatan : PENGELOLA BARANG PERSEDIAAN
3. NHK : 141383

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 219.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU CERIA MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.400.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 330.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.559.400.000

**III. HUTANG** Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.559.400.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **6 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.